

DAMPAK PENUTUPAN JALUR LINTAS BATAS SEBATIK-TAWAU TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT SEBATIK

Nur Aeni¹
NIM. 1302045059

Abstract

Sebatik Island is located in North Kalimantan, which is one of the outer islands of Indonesia. The northern part of Sebatik Island is directly adjacent to Tawau City, Sabah, Malaysia. The society of Sebatik Island and Tawau City carried out the economic activities to fulfill the living needs of each other. However, since 2013, the Sebatik-Tawau cross-borderlines was closed by the Malaysian government because the port and ferry transportation used by the Sebatik society did not meet the safety standards. The purpose of this study is to explain the impact of the closure of the Sebatik-Tawau cross-border line on the socio-economic conditions to Sebatik society. This study uses a description method whose data is taken from direct interviews, books, journals, websites, and valid news. Researchers use the theory of regional economics and the theory of Interdependence. The results showed that the closure of the Sebatik-Tawau transboundary by the Malaysian side had an impact on the social and economic conditions of the Sebatik society. In the social aspect, the use of illegal routes by the Sebatik people to the city of Tawau is increasingly rife due to the demands of the people's economic needs that have changed due to changes in the trade regulation system between Indonesia and Malaysia, the slackening of Malaysian products on Sebatik Island caused an increase in the selling price of people's daily necessities and the marine products of Sebatik fishermen decreased the number of shipments to the city of Tawau, Malaysia.

Keywords: *Sebatik Island – Tawau City, Cross-Border, Regioanal Economics, Interdependence*

Pendahuluan

Pulau Sebatik terletak di sebelah Timur Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan salah satu pulau terluar Negara Indonesia. Bagian utara Pulau Sebatik berBatas an langsung dengan Kota Tawau, Sabah, Negara Malaysia, dan di sebelah barat Pulau Sebatik terletak Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pulau Sebatik merupakan pintu gerbang Indonesia yang merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan.

¹Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. email: nuraeninuraeni18@gmail.com

Jarak antara Pulau Sebatik menuju Kota Tawau jika menggunakan perahu kayu ditempuh sekitar 25 menit, namun jika menggunakan *speedboat* hanya sekitar 15 menit. Sebagai salah satu wilayah perbatasan Negara yang kedua masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan dan kesamaan sosial budaya termasuk dalam penggunaan bahasa sehari-hari (bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia), memudahkan terjadinya aktivitas ekonomi lintas Batas Negara baik warga Sebatik maupun warga Tawau. Masyarakat Indonesia di Pulau Sebatik lebih banyak membeli barang-barang ke Sabah, Malaysia dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Belum meratanya pembangunan di wilayah perbatasan yang menyebabkan pusat perekonomian masyarakat Sebatik memilih memenuhi pasokan kebutuhan sehari-hari dari Kota Tawau, Malaysia seperti beras, minyak goreng, gas elpiji, dan berbagai jenis bahan-bahan pokok lainnya serta menjadikan Kota Tawau sebagai daerah pemasaran hasil bumi dan laut dari Pulau Sebatik. Pihak Malaysia juga merasakan manfaat yang sangat besar dari hasil kerjasama ekonomi dan perdagangan ini, diantaranya mereka dapat membeli hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan harga yang lebih murah. Selain itu, daerah perbatasan Indonesia juga menjadi akses pasar yang potensial bagi produk-produk makanan jadi Malaysia (Sonny Sudiar, 2013: 65)

Dokumen yang digunakan oleh masyarakat Sebatik sebagai dokumen resmi perjalanan Negara untuk dapat dengan mudahnya bepergian keluar masuk wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan status yang jelas adalah dokumen Pas Lintas Batas (PLB). Pas Lintas Batas ini dikeluarkan berdasarkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Negara Malaysia tentang Lintas Batas pada tanggal 12 Mei 1984 di Medan, Indonesia. Pemberlakuan Pas Lintas (PLB) di perbatasan kedua Negara ini merupakan implementasi atas kebijakan *Border Cross Agreement* (BCA), dalam perjanjian yang telah disepakati yaitu *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing*, pada tanggal 12 Januari 2006 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Pas Lintas Batas yang digunakan oleh masyarakat Sebatik juga memiliki fungsi yang sama dengan Paspur yaitu sebagai dokumen perjalanan Negara namun Pas Lintas Batas tidak dapat digunakan sebagai surat perjalanan Negara ke Negara tujuan manapun tetapi hanya ke wilayah tertentu saja.

Namun pada tanggal 1 Januari 2013 pemerintah Malaysia menutup jalur lintas batas Sebatik menuju Tawau dikarenakan transportasi penyeberangan yang digunakan masyarakat Sebatik menuju Tawau tidak memenuhi standar keselamatan. Buruknya infrastruktur juga menjadi alasan pemerintah Malaysia melakukan penutupan jalur Sebatik-Tawau di dermaga Sebatik yang kurang terawat sehingga banyak mengalami kerusakan.

Ketergantungan yang dirasakan oleh masyarakat Sebatik terhadap barang-barang pokok Negara tetangga membuat masyarakat Sebatik merasa sangat dirugikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. Penutupan akses jalur lintas batas Sebatik-Tawau yang juga mengakibatkan penolakan dokumen resmi yang biasa digunakan oleh masyarakat Sebatik dalam melakukan kegiatan lintas batas Negara

yaitu Pas Lintas Batas, menimbulkan dampak yang sangat besar dalam kondisi sosial maupun bagi perekonomian masyarakat perbatasan Sebatik.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Teori Ekonomi Wilayah

Ilmu Ekonomi Wilayah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang ketersediaannya atau kemampuan orang mendapatkan kebutuhan hidup tersebut dalam keadaan terbatas. Ilmu Ekonomi Wilayah atau Ilmu Ekonomi Regional (IER) adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam permabahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lainnya. Definisi wilayah secara klasik atau tradisional adalah area yang berbeda antara yang satu dengan yang lain yang disebabkan karena beberapa hal seperti perbedaan alam, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya atau area yang dibatasi oleh kriteria tertentu (Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, 2014: 1-2)

Ilmu ekonomi wilayah merupakan gabungan antara ilmu ekonomi tradisional dengan teori lokasi. Teori Lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan pengaruh terhadap lokasi berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial, serta analisa interaksi antar wilayah. Dengan berkembangnya teori lokasi, aspek tata ruang dan lokasi kegiatan ekonomi dapat dimasukkan ke dalam analisa ekonomi secara lebih kongkrit (Sjafrizal, 2008: 77).

Walter Isard adalah orang pertama yang memberi wujud (landasan yang kompak) atas Ilmu Ekonomi Regional, IER baru menunjukkan wujudnya setelah diterbitkannya disertasi Walter Isard di Universitas Harvard yang berjudul *Location and Space Economics* pada tahun 1956, Walter Isard adalah orang pertama yang memberikan kerangka landasan tentang apa saja yang dapat dikategorikan ke dalam *Regional Science*, yaitu sebuah pembahasan yang cenderung dilakukan dengan menganalisa ruang lingkup yang lebih luas dengan memasukkan ilmu lain yang terkait seperti Geografi, Ilmu Ekonomi, Ilmu Lingkungan Hidup, Transportasi dan Ilmu Sosial (Sjafrizal, 2008: 12).

Menurut Harry W. Richardson faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Sektor unggulan yang berkembang dengan baik akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Untuk melihat potensi relatif perekonomian wilayah, wajib menentukan sektor-sektor yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah

dan menentukan prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Istilah keunggulan komparatif (*comparative advantage*) pada awalnya dikemukakan oleh David Ricardo tahun 1917 ketika membahas perdagangan dua Negara. David Ricardo menyatakan bahwa apabila ada dua Negara yang saling berdagang dan masing-masing Negara mengkonsentrasikan diri untuk mengeksport barang dan Negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua Negara akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional.

Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Untuk melihat potensi relatif perekonomian wilayah terkait, wajib menentukan sektor-sektor yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat dan di sisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut.

Istilah *comparative advantage* (keunggulan komparatif) pada awalnya dikemukakan oleh David Ricardo tahun 1917 sewaktu membahas dagangan dua Negara. David Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua Negara yang saling berdagang dan masing-masing Negara mengkonsentrasikan diri untuk mengeksport barang bagi Negara tersebut memiliki keunggulan komparatif maka kedua Negara tersebut akan beruntung. Faktor-faktor yang bias membuat suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pemberian alam, yaitu karena kondisi alam akhirnya wilayah itu memiliki keunggulan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Pemberian alam antara lain deposit bahan tambang (minyak, gas, emas, bijih besi, timah, dan lainnya); kondisi tanah yang khas (misalnya tanah Deli untuk produksi tembakau Deli); pemandangan yang indah (misalnya Danau Toba dan alam pegunungan Karo); serta potensi alam (misalnya air terjun untuk pembangkit listrik dan sumber air panas untuk pembangkit listrik).
2. Masyarakatnya menguasai teknologi mutakhir (menemukan hal-hal baru) untuk jenis produk tertentu, contoh: masyarakat Jepang, Amerika, dan Jerman.
3. Wilayah dengan aksesibilitas yang tinggi, misalnya Singapura dengan lalu lintas yang ramai (baik darat, laut maupun udara) membuat angkutan barang/penumpang bisa lebih cepat, tepat waktu, dan lebih murah karena banyak pilihan.
4. Daerah konsentrasi/sentra dari suatu kegiatan sejenis, misalnya produksi sepatu di Cibaduyut (Jabar) dan sayur-sayur di Tanah Karo. Daerah sentra bisa menjamin kepastian adanya barang dalam kualitas yang diinginkan dan ini bias menurunkan biaya pemasaran/biaya transportasi.
5. Daerah agglomerasi dari berbagai kegiatan, yaitu memanfaatkan keuntungan agglomerasi, yaitu efisiensi dalam biaya produksi dan kemudahan dalam pemasaran.
6. Kebijakan pemerintah, antara lain dengan menciptakan salah satu/ beberapa faktor yang menciptakan keunggulan seperti disebutkan di atas. Ada juga cara yang bisa dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan subsidi untuk mendorong sektor tertentu. Akan tetapi, hal ini haruslah bersifat sementara

sehingga akhirnya bisa bersaing tanpa subsidi. Selama pemerintah masih memberikann subsidi, keunggulan tersebut adalah keunggulan semu.

Dalam dunia nyata, kondisi potensi setiap wilayah adalah berbeda. Dampaknya menjadi lebih mudah dianalisis karena tingkah laku manusia dalam kondisi potensi ruang sama, sudah diketahui. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan “gangguan” ketika manusia berhubungan/bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga serta biaya untuk mencapai lokasi yang satu dari lokasi lainnya.

Selain itu, jarak juga menciptakan gangguan informasi sehingga makin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi/karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. Makin jauh jarang yang ditempuh, makin menurun minat orang untuk bepergian dengan asumsi faktor lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat bagaimana lokasi yang memiliki potensi/daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya di mana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki potensi tersebut. Sedangkan interaksi antar wilayah akan dapat pula mempengaruhi perkembangan bisnis yang pada gilirannya akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, 2014: 122-123).

Teori Ketergantungan (Interdependensi)

Interdependensi secara sederhana diartikan sebagai saling ketergantungan. Interdependensi sangat menekankan kehidupan sosial yang terdapat di dalamnya hubungan sosial yang bersifat kerja sama atau kooperatif. Kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial yang terdapat di dalamnya upaya-upaya kolaboratif di antara pihak-pihak atau orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama (<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-interdependensi-dalam-ilmu-sosial>).

Interdependensi dalam politik internasional dipengaruhi oleh situasi oleh efek resiprokal (timbang balik) antara berbagai Negara atau antara aktor-aktor di berbagai Negara. Efek ini biasanya didapatkan sebagai hasil dari transaksi internasional seperti aliran uang, barang, orang dan pesan komunikasi yang melintasi batas-batas wilayah. Beberapa transaksi telah meningkat drastis sejak Perang Dunia ke-II: “beberapa dekade belakangan ini memperlihatkan suatu kecendrungan akan berbagai bentuk keterkaitan antar manusia yang melintasi batas-batas Negara akan semakin meningkat setiap sepuluh tahun. Efek transaksi dari interdependensi akan tergantung kepada hambatan dan biaya.

Robert Keohane dan Joseph Nye menjelaskan bahwa dalam hubungan interdependensi akan selalu terdapat biaya, interdependensi membatasi otonomi, tetapi adalah tidak mungkin untuk menentukan keuntungan dari sebuah relasi yang melebihi biaya. Hal ini akan sangat tergantung pada nilai para aktor seperti kondisi alamiah dari sebuah relasi interdependent yang dipengaruhi oleh hubungan timbal balik.

Kita juga harus berhati-hati agar tidak mendefinisikan interdependensi hanya pada setiap relasi mutual-dependensi yang seimbang. Ini suatu hal yang asimetris dalam

dependensi, ketika para aktor menyediakan sumber-sumber pengaruh dalam berhubungan antara satu aktor dengan lainnya. Aktor yang less-dependent biasanya dapat menggunakan hubungan interdependensi sebagai *power resources* dalam melakukan negosiasi pada suatu isu (<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-interdependensi-interdependence-dalam-ilmu-sosial>).

Untuk memahami peranan dari *power* pada interdependensi, kita harus membedakan dua hal, yaitu *sensitivity* dan *vulnerability*. *Sensitivity* melibatkan tingkat responsivitas dalam *framework* kebijakan, seberapa cepat perubahan pada suatu Negara dapat membawa perubahan pada Negara lainnya, dan seberapa kuat efek perubahannya. Pengukuran tidak hanya tergantung pada volume yang melintasi batas Negara tetapi juga dipengaruhi oleh biaya perubahan transaksi yang terjadi di masyarakat atau pemerintah. *Sensitivity interdependence* tercipta dari interaksi melalui *framework* kebijakan. *Sensitivity* berasumsi bahwa *framework* tidak berubah. Pada faktanya sejumlah kebijakan yang tidak berubah merefleksikan kesulitan akan perumusan kebijakan baru dalam waktu singkat, atau ini juga merefleksikan komitmen pada sejumlah pola dari sistem domestik dan internasional.

Keohane dan Nye mencoba membangun paradigma baru dalam pola relasi para aktor dalam politik internasional, mereka mencoba menggeser paradigma realisme yang menjadikan Negara dalam kondisi *state of war* menjadi pola relasi yang lebih memiliki banyak kemungkinan diluar kemungkinan konflik dan perang. Dengan adanya paradigma *interdependence*, munculnya pola-pola relasi antara aktor yang *less-conflict* dapat diwujudkan sebagai cara pandang baru dalam melihat relasi antar Negara (<http://id.portalgaruda.org/article>).

Banyak teori yang digunakan dalam menganalisis fenomena yang paling sering dibicarakan yaitu globalisasi. Teori ketergantungan merupakan teori yang merunut dari teori struktural yang pada dasarnya adalah bagian A membutuhkan bagian B. Dalam penerapannya memang globalisasi terdapat berbagai kebaikan seperti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi juga memiliki keburukan. Beberapa keburukannya adalah sikap ketergantungan suatu Negara yang harus membutuhkan bantuan padahal apa yang dimilikinya lebih dari cukup. Ketergantungan yang terjadi meliputi ketergantungan ilmu pengetahuan, energi, pangan dan finansial. Dampak Sosial yang terjadi memang tidak dirasakan langsung akan tetapi jika terus dibiarkan akan semakin merusak sistem tatanan masyarakatnya. Krisis yang terjadi di masa akhir orde baru merupakan contoh kecil dimana hanya 2 aspek vital yang menjalar merusak tatanan dan menyebabkan kekacauan di negeri ini.

Dalam hal ini teori yang digunakan merunut pada teori ketergantungan yang asumsi dasarnya menganut dari teori struktural. Yang dimaksud adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi Negara-Negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi Negara-Negara lain, Negara-Negara tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Dampak ketergantungan dari berbagai aspek memang menjadikan problem atau masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk menjelaskan mengenai Dampak Penutupan Jalur Lintas Batas Sebatik-Tawau Terhadap Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Sebatik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara secara langsung dan *library research* yaitu berdasarkan dari buku dan media internet. Sedangkan tehknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan *metode content analysis* dan kajian sejarah yaitu menjelaskan dan menggambarkan data berdasarkan sumber-sumber tertulis yang ada.

Hasil Penelitian

Penutupan jalur perlintasan Sebatik-Tawau oleh pemerintah Malaysia merugikan masyarakat Sebatik yang sering berkunjung ke Tawau, Malaysia sejak tahun 2013. Penutupan jalur tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemerintah Malaysia tanpa melibatkan pemerintah Kabupaten Nunukan. Padahal telah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui perjanjian lintas batas yang dibuat bersama pada tahun 1967. Akibat dari penutupan jalur penyeberangan Sebatik-Tawau ini memberikan dampak perubahan sosial dan perekonomian masyarakat perbatasan karena selama ini sebagian besar kebutuhan pokok didapatkan dari Negara tetangga tersebut.

Dampak Penutupan Jalur Lintas Batas Sebatik-Tawau Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Sebatik:

Semakin Maraknya Penggunaan Jalur Ilegal

Untuk berkunjung ke Kota Tawau masyarakat harus menggunakan jalur Sebatik-Nunukan-Tawau yang membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang lebih panjang untuk sampai ke tujuan. Dikarenakan kapal *ferry* dan fasilitas pelabuhan yang memenuhi standar keamanan internasional hanya ada di Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Liem Hie Djung Kabupaten Nunukan (Wawancara langsung bersama dengan Bapak Aco, Salah Satu Masyarakat Sebatik yang Sering Melihat Proses Terjadinya Jalur Ilegal di Desa Aji Kuning, Sebatik Utara).

Masyarakat harus menempuh perjalanan dari Sebatik ke Nunukan sekitar 1 jam menggunakan jalur darat, kemudian menempuh perjalanan laut sekitar 20 menit dari Pulau Sebatik ke Pulau Nunukan. Sesampainya di imigrasi Nunukan, masyarakat harus menunggu cukup lama untuk melakukan sistem administrasi meminta cap izin baik bagi pengguna Pas Lintas Batas maupun Paspur dengan antrian yang cukup panjang karena harus menunggu bersama warga Nunukan yang juga akan menuju Kota Tawau.

Jalur yang lebih jauh, waktu yang lebih panjang serta biaya yang lebih tinggi yang membuat banyak masyarakat Sebatik memilih menggunakan jalur ilegal untuk berkunjung ke Tawau. Sepanjang garis perbatasan di wilayah Sebatik banyak jalan dapat dilalui oleh masyarakat setempat yang ingin ke Malaysia tanpa melalui TPI Nunukan dan aktivitas ilegal ini dilakukan oleh masyarakat setempat pada saat dini hari ketika para aparat pengawas jalur laut sedang beristirahat dan berlayar di tepi-tepi laut agar tidak tertangkap lampu pengawas.

Kegiatan ilegal seperti ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun namun aktivitas ilegal semakin sering terjadi diakibatkan penutupan jalur yang dilakukan oleh pihak Malaysia dan hal ini menyebabkan banyak oknum yang ingin mengambil keuntungan dibalik jalur ilegal. Sesampainya di Tawau, pemilik kapal melabuhkan kapal tidak di pelabuhan Batu sesuai dengan peraturan yang ada, melainkan di Tawau pun terdapat titik-titik tertentu untuk menyandarkan kapal-kapal tersebut.

Untuk melakukan pengawasan jalur ilegal di laut perlu alutsista yang lengkap. Karena para pengguna jalur ilegal khusus di laut memiliki perlengkapan yang canggih. Seperti kapal/*speedboat* yang digunakan, lebih laju dibanding *speedboat* yang digunakan personel yang melakukan pengawasan di laut (Wawancara langsung bersama dengan Bapak Aco, Salah Satu Masyarakat Sebatik yang Sering Melihat Proses Terjadinya Jalur Ilegal di Desa Aji Kuning, Sebatik Utara).

Dampak Perekenomian Masyarakat Sebatik dari Penutupan Jalur Lintas Batas Sebatik-Tawau:

a. Perubahan Sistem Regulasi Perdagangan

Penutupan jalur lintas batas Sebatik-Tawau ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pola hidup masyarakat Sebatik. Perubahan sistem perdagangan pada awalnya membuat masyarakat mengalami kerugian besar dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penyesuaian diri terhadap hal baru. Sejak penutupan jalur, terjadi perubahan dalam sistem perdagangan masyarakat setempat (<https://kaltim.tribunnews.com/2016/06/21/otoritas-sabah-larang-kapal-nunukan-masuk-minyak-goreng-dan-gula-mulai-langka-di-pasaran>).

Kebutuhan pokok masyarakat perbatasan Sebatik memang banyak yang didatangkan dari Negara tetangga, Kota Tawau, Malaysia, bahkan pada saat terjadinya penutupan jalur Sebatik-Tawau, barang-barang produksi Malaysia masih tetap banyak diperdagangkan di pasar atau toko-toko milik masyarakat Sebatik. Selain dikarenakan masyarakat yang menggunakan jalur ilegal untuk tetap mendatangkan barang-barang tersebut, juga terdapat kapal-kapal kayu berukuran besar yang selama ini memang bertugas untuk mengangkut barang-barang baik hasil bumi dan laut milik masyarakat Sebatik dan juga mendatangkan barang-barang sembako dari Tawau, Malaysia.

Namun sejak adanya kebijakan penutupan jalur, pemerintah Malaysia yang beberapa kali membuka dan menutup kembali jalur resmi tersebut dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Malaysia. Syarat-syarat mengacu pada *International Maritime Organization (IMO)*, kapal harus memiliki sertifikat, memiliki *cargo ship safety certificate* dan minimal *safe manning certificate near coastal*. Kapal-kapal kayu itu juga dipastikan harus stabil dan menjamin keselamatan kapal dengan menyusun semua kargo yang dibawa.

Selanjutnya, memastikan penyusunan kargo dengan adanya pendataan klasifikasi barang, *waterfight integrity* kapal selalu dalam kondisi baik, memastikan mematuhi semua aturan yang berlaku dan bagi para awak kapal harus menggunakan Paspor sebagai dokumen resmi karena berlayar di perairan

internasional (<https://kaltim.tribunnews.com/2016/06/21/otoritas-sabah-larang-kapal-nunukan-masuk-minyak-goreng-dan-gula-mulai-langka-di-pasarang>).

Sementara memberikan kesempatan kepada pemilik kapal kayu untuk memenuhi persyaratan, pihak pemerintah negeri Sabah, Malaysia mewajibkan kapal-kapal kayu berlabuh di pelabuhan internasional. Dengan berlabuhnya kapal-kapal tersebut dipelabuhan internasional maka terjadi perubahan regulasi perdagangan dari yang sebelumnya menggunakan sistem *Traditional Trade* atau perdagangan tradisional, kapal-kapal kayu tersebut hanya perlu berlabuh di pelabuhan tradisional namun menjadi sistem *Normal Trade*.

Menurut perwakilan Himpunan Pengusaha Lintas Batas (HPLB), sejak dibuka kembali jalur perdagangan antara Nunukan-Tawau membuat pengusaha Sembilan Bahan Pokok (Sembako) mengalami kerugian. Biaya untuk sekali aktifitas dibebankan menjadi RM 7.000 - RM 8.000 atau sekitar Rp 24.000.000,00. Jika di pelabuhan tradisional dengan sistem *Traditional Trade* hanya mengeluarkan biaya RM 1.000 atau Rp 3.500.000 (<https://kaltara.prokal.co/read/news/386suplai-sembako-dari-tawau-mulai-rugikan-pedagang.html>).

b. Perubahan Harga Jual Barang Diikuti Berkurangnya Jumlah Ketersediaan Barang

Pengecualian yang diberlakukan oleh pemerintah Malaysia selama jalur laut dibuka justru semakin memberatkan pedagang lintas batas Sebatik dan pedagang Nunukan. Harga kebutuhan pokok yang didatangkan dari Tawau melonjak naik. Hal ini disebabkan oleh pembatasan masuknya kapal-kapal pengangkut sembako serta adanya peraturan baru pembatasan nominal belanja bagi setiap pedagang lintas batas yaitu maksimum RM 600.00 atau Rp 2.100.000 perorang setiap bulannya membuat stok produk-produk Malaysia di Sebatik semakin sedikit seperti gula, tepung, dan minyak goreng, serta tabung gas yang saat ini sulit didapatkan di daerah perbatasan Sebatik (<https://kaltara.prokal.co/read/tabung-gas-asal-malaysia-menghilang-dari-pasaran>).

Adanya tambahan beban biaya pelabuhan yang besar mengharuskan pedagang Sebatik dan Nunukan menaikkan harga barang yang dijual di pasaran. Para pedagang lintas batas terpaksa menjual gula Malaysia di wilayah pasar Sebatik dengan harga Rp 15.000 yang sebelumnya hanya Rp 11.000. Pembatasan masuknya kapal-kapal pengangkut sembako ke Malaysia dan pembatasan nominal belanja perbulan berdampak pada kelangkaan barang yang diikuti kenaikan harga.

Namun, seiring dengan berjalan waktu hal ini membuat masyarakat Sebatik maupun pihak pemerintah setempat dapat mengurangi sikap ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap produk-produk Negeri Jiran dengan menggunakan produk-produk lokal meskipun harus dengan resiko waktu dan biaya yang lebih besar. Masyarakat semakin sering menggunakan produk-produk lokal jika dibandingkan pada saat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak Malaysia tersebut diberlakukan untuk masyarakat perbatasan Pulau Sebatik (Wawancara Langsung Bersama Bapak Umar, Bapak Yunus, Ibu Wati, Ibu Mida, Ibu

Hasnah, dan Bapak Ridwan sebagai Masyarakat Pelaku Usaha dan Ibu Rumah Tangga di Sebatik).

Contohnya untuk tabung gas Malaysia yang sudah sulit untuk didapatkan di daerah Sebatik dan saat ini digantikan dengan tabung gas 3 Kg buatan Indonesia yang sudah bisa dijumpai di warung-warung masyarakat dan juga SPBU-SPBU yang terdapat di daerah Pulau Sebatik.

c. Penurunan Jumlah Pengiriman Hasil Laut Nelayan

Pada tahun 2016, Majelis Keselamatan Negeri Sabah Malaysia memberikan surat terkait larangan untuk kesekian kalinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang berisi larangan kapal-kapal kayu nelayan Sebatik memasuki wilayah Pelabuhan Tawau, Malaysia dengan alasan kapal tidak memenuhi standar keselamatan internasional. Akibat larangan tersebut, nelayan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara tidak bisa menjual hasil melaut mereka ke Negara Bagian Sabah, Malaysia dan nilai penjualan ikan dari nelayan Sebatik ke Tawau menurun drastis (<https://regional.kompas.com/read/kapal.dilarang.masuk.malaysia>).

Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan menunjukkan melalui pantauan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sebatik, biasanya kapal ikan dari Sebatik mampu memasok ikan segar ke Tawau, Malaysia sebanyak 800 ton per bulan. Namun, dampak dari larangan masuk kapal ikan Indonesia ke Malaysia membuat pengiriman ikan meturun hingga 70%. Pada tahun 2016 nelayan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara tercatat memasok ikan ke Tawau Malaysia sebanyak 2.500 ton dengan nilai penjualan mencapai Rp 7,3 miliar.

Kesimpulan

Sebatik adalah wilayah perbatasan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, tepatnya antara Pulau Sebatik dan Kota Tawau, Negara Bagian Sabah, Malaysia. Hampir semua kebutuhan sehari-hari masyarakat Pulau Sebatik didatangkan dari Kota Tawau, Malaysia. Kota Tawau juga sebagai tempat pemasaran hasil bumi dan laut milik masyarakat Sebatik. Pihak Malaysia juga merasakan manfaat yang sangat besar dari hasil kerjasama antar kedua Negara, diantaranya pihak Malaysia dapat membeli hasil pertanian dan perikanan dengan harga yang terjangkau serta daerah Sebatik juga menjadi akses pasar yang potensial bagi produk-produk minuman dan makanan dari Malaysia. Namun pada awal tahun 2013 pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan penutupan jalur lintas batas Sebatik-Tawau karena alat transportasi laut yang digunakan masyarakat dan fasilitas dermaga yang tidak memenuhi standar keselamatan internasional. Akibatnya, masyarakat Sebatik yang ingin berkunjung ke Kota Tawau harus melalui jalur Sebatik-Nunukan-Tawau yang membutuhkan jarak, waktu dan biaya yang lebih besar daripada sebelumnya ketika menggunakan jalur lintas batas Sebatik-Tawau. Tidak hanya jalur lintas batas bagi kapal-kapal penumpang yang ditutup tapi juga kapal-kapal kayu pengangkut sembako dan hasil bumi masyarakat Sebatik tidak diberikan izin masuk ke pelabuhan Batu Kota Tawau. Namun, pada akhirnya setelah beberapa waktu dengan berbagai pertimbangan kedua belah pihak, kapal-kapal kayu pengangkut sembako dan hasil bumi kembali berikan izin guna mendukung kegiatan perdagangan antar kedua

wilayah dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah Malaysia, terjadi perubahan kondisi masyarakat Sebatik baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun kondisi perekonomian. Selain perubahan jalur, setelah diberikan izin operasi kembali terjadi perubahan regulasi perdagangan dari yang sebelumnya menggunakan sistem *Traditional Trade* atau perdagangan tradisional sekarang menjadi sistem *Normal Trade* dan mengalami kenaikan biaya. Masyarakat semakin sering menggunakan jalur-jalur ilegal menuju Kota Tawau. Dari perubahan sistem perdagangan mengakibatkan kelangkaan barang-barang sembako diikuti dengan kenaikan harga barang sembako dan nilai penjualan hasil laut para nelayan Sebatik mengalami penurunan daripada sebelumnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media, Cetakan Pertama
- Sonny, Sudiar. 2011. *Sosek Malindo Kal-Tim Sabah, Kerjasama Pembangunan Internasional di Wilayah Perbatasan Negara*. Surabaya: Pustaka Radja
- Tarigan, Robinson. 2014. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumber Lain

- Afandi, SA. 2015. "Globalisasi dan Dampak Ketergantungan Negara" *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, (Online) dalam <http://socialphotograph.web.unej.ac.id/>
- Interdependence dalam Ilmu Sosial dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-teori-interdependensi-interdependence-dalam-ilmu-sosial/4999/3>
- Investor Swasta Bagun Pabrik CPO Pertama di Sebatik dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20150302/78/407860/investor-swasta-bangun-pabrik-cpo-pertama-di-sebatik>
- Ismah Tita Ruslin "Relasi Ekonomi Politik Dalam Perspektif Dependencia" dalam artikel *jurnal-politik_profetik* hal. 2 <http://id.portalgaruda.org/article>
- Kapal Dilarang Masuk Malaysia, Nelayan Gunakan Jalur Perdagangan Tradisional dalam <https://regional.kompas.com/read/2016/11/16/09290011/kapal.dilarang.masuk.malaysia.nelayan.gunakan.jalur.perdagangan.tradisional.untuk.jual.ikan/>
- Kapal Kayu Suplai Sembako diakses dalam <http://kaltara.prokal.co/read/news/3865-suplai-sembako-dari-tawau-mulai-rugikan-pedagang.html/>
- Malaysia Cabut Larangan Kapal Kayu Nelayan di Wilayah Perbatasan dalam <https://regional.kompas.com/read/2017/02/03/10285991/malaysia.cabut.larangan.kapal.kayu.nelayan.di.wilayah.perbatasan/>

Suplai Sembako dari Tawau Mulai Rugikan Pedagang dalam
<http://kaltara.prokal.co/read/news/3865-suplai-sembako-dari-tawau-mulai-rugikan-pedagang.html>

Tabung Gas Asal Malaysia Menghilang dari Pasaran dalam
<https://kaltara.prokal.co/read/news/29478-tabung-gas-asal-malaysia-menghilang-dari-pasaran>

Otoritas Sabah Larang Kapal Nunukan Masuk Minyak Goreng, Gula, Mulai Langkah dalam
<http://kaltim.tribunnews.com/2016/06/21/otoritas-sabah-larang-kapal-nunukan-masuk-minyak-goreng-dan-gula-mulai-langka-di-pasaran/>

Uji Coba Tol Laut Hanya Bwa Air Mineral ke Perbatasan dalam
<https://regional.kompas.com/read/2017/03/31/12424081/uji.coba.kapal.tol.laut.hanya.ba9wa.air.mineral.ke.perbatasan/>